

**Implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam Perspektif
Pengembangan Organisasi Publik di Puskesmas Rogotrunan
Kabupaten Lumajang**

Prasojo Ashar Nur Darmawan¹⁾, Nico Valentino Wijaya²⁾, Titis Srimurni³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi Negara, Universitas Lumajang

email: prasojoashar123@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam perspektif pengembangan organisasi publik di Puskesmas Rogotrunan, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek komunikasi, koordinasi antarpegawai dan penyampaian informasi program dilakukan melalui rapat internal, briefing, serta komunikasi langsung. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan, meskipun masih terdapat keterbatasan sumber daya serta meningkatnya beban kerja pegawai. Pada aspek disposisi pelaksana, pegawai menunjukkan sikap positif, komitmen, dan kemampuan adaptasi dalam menjalankan program. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Faktor yang mendukung pelaksanaan program meliputi dukungan pimpinan, kerja sama antarpegawai, komitmen pelaksana, serta respons positif masyarakat. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas pelayanan, peningkatan beban kerja, serta kendala koordinasi. Secara keseluruhan, implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan menunjukkan adanya upaya pengembangan organisasi publik melalui peningkatan koordinasi kerja, penyesuaian sistem pelayanan, dan peningkatan kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Program Cek Kesehatan Gratis; Pengembangan Organisasi Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Free Health Check Program (CKG) from the perspective of public organizational development at Rogotrunan Public Health Center, Lumajang Regency. This study employed a qualitative approach with a case study research design. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation. The focus of the study used George C. Edwards III's policy implementation theory, which includes communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of the CKG program at Rogotrunan Public Health Center has generally been carried out quite well. In the communication aspect, coordination among employees and dissemination of program information were conducted through internal meetings, briefings, and direct communication. In terms of resources, the implementation of the program was supported by health workers and service facilities, although there were still limitations in resources and increased employee workload. In the implementer disposition aspect, employees demonstrated positive attitudes, commitment, and adaptability in carrying out the program. Meanwhile, in the bureaucratic structure aspect, program implementation was supported by clear task distribution and adjustments to Standard Operating Procedures (SOPs) according to service needs. Supporting factors in program implementation include leadership support, cooperation among employees, implementer commitment, and positive public responses. Meanwhile, inhibiting factors include limited health personnel, limited service facilities, increased workload, and coordination constraints. Overall, the implementation of the CKG program at Rogotrunan Public Health Center reflects efforts toward public organizational development through improved work coordination, adjustments to service systems, and the organization's ability to adapt to public health service demands.

Keywords: *Policy Implementation; Free Health Check Program; public Organization Development.*

1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran strategis dalam memberikan layanan yang mudah diakses, merata, dan berkualitas. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah terus mengembangkan berbagai program inovatif, salah satunya adalah Program Cek Kesehatan Gratis

(CKG) yang bertujuan memperluas akses layanan kesehatan preventif bagi masyarakat.

Program CKG tidak hanya berorientasi pada peningkatan cakupan layanan kesehatan, tetapi juga menuntut kesiapan organisasi pelayanan publik, khususnya Puskesmas, dalam mengelola program tersebut secara efektif. Implementasi program ini membawa konsekuensi terhadap aspek internal organisasi, seperti pengelolaan sumber daya manusia, penyesuaian prosedur kerja, peningkatan koordinasi, serta peran kepemimpinan dalam mengarahkan pelaksanaan program. Dengan kata lain, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dirancang, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan menyesuaikan diri dengan tuntutan program tersebut.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edwards III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya di tingkat organisasi pelayanan publik, faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dalam proses pengelolaan organisasi sehari-hari. Oleh karena itu, implementasi program CKG menarik untuk dikaji tidak hanya dari sisi keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga dari bagaimana program tersebut dikelola dalam konteks organisasi Puskesmas.

Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang, sebagai salah satu unit pelayanan kesehatan, memiliki peran penting dalam pelaksanaan Program CKG di tingkat lokal. Dalam menjalankan program ini, Puskesmas dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, meningkatnya beban kerja, kebutuhan penyesuaian alur pelayanan, serta tuntutan untuk tetap menjaga kualitas layanan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menuntut pengelolaan organisasi yang adaptif, efektif, dan responsif terhadap perubahan.

Pengelolaan organisasi dalam konteks implementasi program menjadi aspek penting untuk dikaji, karena di dalamnya terdapat proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang menentukan keberhasilan program. Selain itu, dinamika yang terjadi dalam organisasi, seperti koordinasi antarpegawai, pola komunikasi, serta peran pimpinan dalam mengelola perubahan, menjadi faktor yang sangat menentukan keberlanjutan program.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dikelola di Puskesmas Rogotrunan, Kabupaten Lumajang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga menggali lebih dalam praktik pengelolaan organisasi yang terjadi di dalamnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian

administrasi publik, khususnya pada aspek organisasi dan manajemen pelayanan publik di sektor kesehatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada pelaksana secara jelas dan konsisten. Sumber daya meliputi ketersediaan tenaga kerja, anggaran, fasilitas, dan informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana mencerminkan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur kerja, serta mekanisme koordinasi di dalam organisasi.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, implementasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Keberhasilan suatu program kesehatan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata.

2.2 Pengembangan Organisasi Publik

Pengembangan organisasi (organization development) merupakan upaya terencana yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi melalui perubahan struktur, sistem, perilaku, maupun budaya organisasi. Menurut Cummings dan Worley (2019), pengembangan organisasi merupakan proses perubahan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan serta beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

Dalam sektor publik, pengembangan organisasi diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Organisasi publik dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Pengembangan organisasi dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan prosedur pelayanan, serta pengembangan sistem manajemen yang lebih efektif.

Implementasi program baru sering kali menjadi pemicu terjadinya proses pengembangan organisasi karena organisasi harus melakukan penyesuaian terhadap struktur kerja, pola koordinasi, dan mekanisme pelayanan agar mampu memenuhi tuntutan program yang dijalankan.

2.3 Program Cek Kesehatan Gratis (CKG)

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan preventif melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Program ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Pemeriksaan Kesehatan Gratis.

Program CKG berorientasi pada upaya deteksi dini faktor risiko kesehatan, penyakit tidak menular, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, program ini juga menuntut kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya puskesmas, dalam mengelola peningkatan jumlah pelayanan, penyesuaian prosedur kerja, serta penguatan koordinasi organisasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) serta bagaimana program tersebut dikelola di Puskesmas. Studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu lokus, yaitu Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang, sehingga memungkinkan peneliti menggali fenomena secara komprehensif dan kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Aplikasi SIMAYA

UPT Puskesmas Rogotrunan merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang berada di wilayah Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Puskesmas ini memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, baik yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Secara geografis, Puskesmas Rogotrunan berlokasi di Jl. Brantas No. 5, Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Lokasi ini tergolong cukup strategis karena berada di pusat wilayah perkotaan sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, puskesmas ini juga berfungsi sebagai

fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi peserta BPJS Kesehatan serta memberikan layanan rawat inap bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan lanjutan.

Dalam menjalankan tugasnya, Puskesmas Rogotrunan mengacu pada regulasi yang mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk standar manajemen Puskesmas dan pelayanan kesehatan dasar. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, puskesmas ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan berbagai program kesehatan pemerintah, termasuk program promotif dan preventif yang berbasis masyarakat.

Secara organisasi, Puskesmas Rogotrunan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kepala puskesmas, tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, serta tenaga administrasi yang mendukung operasional pelayanan. Struktur ini dirancang untuk menunjang efektivitas pelayanan serta memastikan koordinasi antar bagian dapat berjalan dengan baik. Selain itu, puskesmas juga memiliki berbagai dokumen pendukung organisasi seperti standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan minimal, serta sistem pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan.

Dalam aspek pelayanan, Puskesmas Rogotrunan menyediakan berbagai jenis layanan kesehatan, seperti pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, serta kegiatan kesehatan berbasis masyarakat seperti posyandu, edukasi kesehatan, dan program pencegahan penyakit. Selain itu, puskesmas juga aktif melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di lingkungan masyarakat, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis yang menasar kelompok tertentu seperti anak usia sekolah dan remaja.

Sebagai organisasi pelayanan publik, Puskesmas Rogotrunan juga berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui pengukuran kepuasan masyarakat, penyediaan sistem pengaduan, serta penerapan standar pelayanan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan organisasi tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan berbagai fungsi dan peran tersebut, UPT Puskesmas Rogotrunan menjadi salah satu institusi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Lumajang. Kondisi ini menjadikan Puskesmas Rogotrunan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi program kesehatan, khususnya dari perspektif pengelolaan organisasi publik.

4.2 Gambaran Umum CKG

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya yang bersifat pencegahan. Program ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang pemeriksaan kesehatan gratis.

A. Tujuan Program CKG

Tujuan utama dari program CKG adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan individu. Secara lebih rinci, tujuan program ini meliputi:

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala sebagai upaya pencegahan penyakit.
- 2) Mendeteksi secara dini faktor risiko kesehatan, kondisi pra-penyakit, serta penyakit tidak menular yang berpotensi berkembang lebih lanjut.
- 3) Mendorong perubahan perilaku hidup sehat melalui edukasi dan penyuluhan yang diberikan selama proses pemeriksaan kesehatan.
- 4) Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan dalam memperoleh layanan pemeriksaan kesehatan.
- 5) Mendukung penguatan sistem pelayanan kesehatan primer, terutama dalam hal pengelolaan data kesehatan dan pemantauan kondisi kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan tujuan tersebut, program CKG tidak hanya berorientasi pada pemberian layanan kesehatan, tetapi juga berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun budaya preventif di masyarakat.

B. Sasaran Program CKG

Sasaran program CKG adalah masyarakat secara umum dengan pendekatan yang lebih spesifik berdasarkan siklus hidup dan kelompok risiko. Sasaran tersebut meliputi:

- 1) Individu yang berulang tahun, sebagai target utama program, dengan memanfaatkan momentum hari ulang tahun untuk meningkatkan partisipasi dalam pemeriksaan kesehatan.
- 2) Kelompok usia produktif dan lanjut usia, yang memiliki potensi risiko lebih tinggi terhadap penyakit tidak menular.
- 3) Kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.
- 4) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas.

- 5) Masyarakat umum di wilayah kerja Puskesmas, sebagai bagian dari pendekatan pelayanan kesehatan berbasis wilayah.

Selain itu, sasaran program juga mencakup aspek kelembagaan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas yang berperan sebagai pelaksana utama program. Dalam hal ini, Puskesmas tidak hanya menjadi penyedia layanan pemeriksaan kesehatan, tetapi juga pengelola program yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan evaluasi kegiatan.

4.3 Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam Perspektif Pengembangan Organisasi Publik di Puskesmas Rogotrunan kabupaten Lumajang

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting dalam implementasi program karena berkaitan dengan penyampaian informasi, koordinasi, serta pemahaman pelaksana terhadap tujuan program. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan dilakukan melalui rapat koordinasi, briefing internal, serta komunikasi langsung antarpegawai.

Informasi mengenai program disampaikan oleh pimpinan dan penanggung jawab program kepada seluruh tenaga kesehatan dan pegawai administrasi sebelum program dilaksanakan. Penyampaian informasi tersebut meliputi tujuan program, mekanisme pelayanan, pembagian tugas, serta target pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang dilakukan secara rutin, pegawai dapat memahami peran masing-masing dalam pelaksanaan program.

Selain itu, koordinasi antartugas juga berjalan dengan cukup baik. Sebelum pelayanan dimulai, biasanya dilakukan briefing untuk memastikan kesiapan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan. Selama pelaksanaan program, komunikasi dilakukan secara langsung apabila terdapat kendala di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi menjadi sarana penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Pemahaman pegawai terhadap tujuan program juga tergolong baik. Pegawai memahami bahwa Program CKG bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan gratis, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Pemahaman tersebut mendorong pegawai untuk menjalankan tugas dengan lebih maksimal.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program masih ditemukan beberapa hambatan komunikasi, seperti kesalahpahaman terkait pembagian tugas dan perubahan alur pelayanan. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui

koordinasi langsung dan penjelasan ulang dari pimpinan maupun penanggung jawab program.

Dengan demikian, komunikasi dalam pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan dapat dikatakan berjalan cukup efektif karena adanya penyampaian informasi yang jelas, koordinasi antarpegawai, serta dukungan pimpinan dalam menjaga kelancaran komunikasi di dalam organisasi.

B. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program. Dalam pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan, sumber daya yang dimaksud mencakup tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, sarana pendukung, serta pembagian beban kerja.

Berdasarkan hasil penelitian, tenaga kesehatan di Puskesmas Rogotrunan pada dasarnya mampu menjalankan program dengan baik. Namun, adanya Program CKG menyebabkan peningkatan jumlah masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan, sehingga beban kerja pegawai menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Tenaga kesehatan tidak hanya melayani pasien reguler, tetapi juga harus memberikan pelayanan kepada peserta Program CKG. Kondisi tersebut membuat pegawai harus bekerja lebih cepat dan lebih efektif agar seluruh pelayanan dapat berjalan dengan baik. Untuk mengatasi peningkatan beban kerja tersebut, pihak puskesmas melakukan pembagian tugas dan pengaturan jadwal pelayanan yang lebih terstruktur.

Selain sumber daya manusia, fasilitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program. Puskesmas Rogotrunan berupaya memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal untuk mendukung pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis. Namun demikian, dalam beberapa kondisi masih terdapat keterbatasan sarana dan alat kesehatan yang menyebabkan pelayanan harus dilakukan secara bergiliran.

Upaya yang dilakukan organisasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya antara lain dengan mengoptimalkan tenaga yang tersedia, meningkatkan koordinasi antarpegawai, serta mengajukan tambahan fasilitas kepada dinas kesehatan. Hal ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi organisasi dalam menghadapi tuntutan program pelayanan publik.

Secara keseluruhan, sumber daya dalam pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan sudah cukup mendukung, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperbaiki agar pelayanan dapat berjalan lebih optimal.

C. Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana berkaitan dengan sikap, komitmen, dan tanggung jawab pegawai dalam menjalankan program. Dalam implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan, sikap pelaksana memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan Program CKG. Pegawai memiliki kesadaran bahwa program tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan terjangkau.

Komitmen pegawai terlihat dari kesiapan mereka dalam menjalankan pelayanan meskipun beban kerja meningkat. Pegawai tetap berusaha memberikan pelayanan sesuai prosedur dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pegawai juga menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pola kerja sejak adanya Program CKG.

Perubahan cara kerja terlihat dari meningkatnya intensitas pelayanan, penyesuaian jadwal kerja, serta perlunya kerja sama antarpegawai dalam menjalankan pelayanan. Kondisi tersebut mendorong munculnya inisiatif dan inovasi sederhana dari pegawai, seperti mempercepat sistem antrean pelayanan, meningkatkan koordinasi antarbagian, serta memberikan edukasi kesehatan secara langsung kepada masyarakat.

Peran pimpinan juga sangat berpengaruh dalam membentuk disposisi pelaksana. Kepala puskesmas secara aktif memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program sehingga pegawai tetap memiliki semangat dan tanggung jawab dalam bekerja.

Dengan demikian, disposisi pelaksana dalam implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan dapat dikatakan cukup baik karena didukung oleh sikap positif, komitmen kerja, serta kemampuan adaptasi pegawai terhadap perubahan organisasi.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, mekanisme kerja, serta prosedur pelayanan dalam pelaksanaan program. Dalam implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan, struktur birokrasi berperan dalam mengatur jalannya pelayanan agar lebih terorganisasi.

Pelaksanaan program dilakukan berdasarkan pembagian tugas sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing pegawai. Tenaga kesehatan bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan, petugas administrasi menangani pendataan pasien, sedangkan koordinator program bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kegiatan.

Selain pembagian tugas, pelaksanaan program juga didukung oleh adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Puskesmas melakukan penyesuaian SOP, terutama pada alur pelayanan, sistem antrean, dan mekanisme pemeriksaan kesehatan, agar pelayanan Program CKG dapat berjalan secara efektif.

Alur pelayanan dimulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian hasil pemeriksaan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat. Penyesuaian alur pelayanan tersebut dilakukan agar pelayanan Program CKG tidak mengganggu pelayanan reguler di puskesmas.

Dalam kondisi tertentu, pegawai juga harus menjalankan pelayanan di tengah keterbatasan tenaga maupun fasilitas. Oleh karena itu, kerja sama antarpegawai menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran pelayanan. Pimpinan juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan.

Secara umum, struktur birokrasi dalam pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan sudah berjalan cukup baik karena didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penyesuaian SOP, serta pengawasan dari pimpinan organisasi.

4.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam Perspektif Pengembangan Organisasi Publik di Puskesmas rogotrunan Kabupaten Lumajang

Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas Rogotrunan, Kabupaten Lumajang, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat jalannya program tersebut. Faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas pelayanan, kesiapan organisasi, serta kemampuan pegawai dalam menjalankan program sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan program adalah dukungan pimpinan organisasi. Kepala Puskesmas Rogotrunan memiliki peran penting dalam memberikan arahan, pengawasan, dan motivasi kepada pegawai selama pelaksanaan program. Dukungan pimpinan terlihat melalui koordinasi yang dilakukan secara rutin, pemberian solusi atas kendala yang muncul, serta pengawasan langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah.

Selain itu, kerja sama antarpegawai juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi Program CKG. Pelaksanaan program membutuhkan koordinasi yang baik antara tenaga kesehatan, petugas administrasi, dan penanggung jawab program. Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik membuat pelaksanaan pelayanan menjadi lebih lancar, terutama ketika menghadapi peningkatan jumlah masyarakat yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Pegawai

saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pelayanan tetap dapat berjalan meskipun sumber daya terbatas.

Faktor pendukung lainnya adalah komitmen pegawai dalam menjalankan program tersebut. Pegawai menunjukkan sikap tanggung jawab dan kesadaran bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih baik. Komitmen tersebut terlihat dari upaya pegawai untuk tetap memberikan pelayanan secara maksimal meskipun beban kerja meningkat dan fasilitas pelayanan terbatas.

Respons masyarakat yang positif terhadap Program CKG juga menjadi faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis karena dapat memperoleh layanan kesehatan dengan lebih mudah dan tanpa biaya. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa program ini memiliki manfaat yang dirasakan secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Rogotrunan.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program CKG juga menghadapi beberapa faktor penghambat. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani, terutama ketika jumlah peserta program meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan pegawai mengalami peningkatan beban kerja karena harus melayani pasien reguler dan peserta Program CKG secara bersamaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam perspektif pengembangan organisasi publik di Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan cukup baik dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Implementasi program tersebut dapat dilihat melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pada aspek komunikasi, pelaksanaan Program CKG didukung oleh adanya koordinasi dan penyampaian informasi yang dilakukan melalui rapat internal, briefing, dan komunikasi langsung antarpegawai. Komunikasi yang berjalan cukup efektif membantu pegawai memahami tujuan program, pembagian tugas, serta mekanisme pelayanan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah. Meskipun masih terdapat kendala berupa kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas, permasalahan tersebut dapat diatasi melalui koordinasi dan arahan dari pimpinan.

Pada aspek sumber daya, Puskesmas Rogotrunan telah berupaya memanfaatkan tenaga kesehatan dan fasilitas yang tersedia secara maksimal dalam mendukung pelaksanaan Program CKG. Namun demikian, peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti program menyebabkan beban kerja pegawai menjadi lebih besar. Selain itu, masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan dan sarana pelayanan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak puskesmas melakukan pembagian tugas, pengaturan jadwal pelayanan, serta meningkatkan koordinasi antarpegawai.

Pada aspek disposisi pelaksana, pegawai menunjukkan sikap positif dan komitmen yang baik dalam menjalankan Program CKG. Pegawai memiliki kesadaran bahwa program tersebut merupakan bentuk pelayanan publik yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah. Sikap tanggung jawab dan kemampuan adaptasi pegawai terhadap perubahan pola kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Selain itu, muncul berbagai inisiatif dan inovasi sederhana dalam pelayanan untuk meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan Program CKG telah didukung dengan adanya pembagian tugas yang jelas serta penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai kebutuhan pelayanan. Struktur kerja yang terorganisasi membantu pelaksanaan pelayanan menjadi lebih tertib dan sistematis. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pimpinan juga berperan penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program CKG di Puskesmas Rogotrunan. Faktor pendukung meliputi dukungan pimpinan, kerja sama antarpegawai, komitmen pelaksana, dan respon positif masyarakat terhadap program pelayanan kesehatan gratis. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas pelayanan, peningkatan beban kerja pegawai, serta kendala koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Secara keseluruhan, implementasi Program CKG di Puskesmas Rogotrunan Kabupaten Lumajang telah menunjukkan adanya upaya pengembangan organisasi publik melalui peningkatan koordinasi kerja, penyesuaian sistem pelayanan, serta kemampuan organisasi dalam beradaptasi terhadap tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, program ini dinilai mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Rogotrunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2019). Organization Development and Change (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Dunn, W. N. (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2018). Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.